

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Amir, Chaerul, 2014, *Kejaksanaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis: Historis, Sosiologis, dan Yuridis)*, Pro Deleader, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Danil, Elwi, 2012, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Haeranah, 2016, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Hamzah, Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M., 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Kasiyanto, Agus, 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia: Tepat Dibaca bagi Para Penegak Hukum, Aktivis LSM Anti-Korupsi, dan Calon Koruptor*, Kencana, Jakarta.
- Kristian, dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP: Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksanaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Jakarta.

- Prinst, Darwan, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar.
- Sofyan, Andi Muhammad Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2014, *Hukum Acara Pidana*, ed. 3, cet. 5, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widijowati, Dijan, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed.1, Andi, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- SEMA No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum.
- SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Putusan No. 17/Pid.Gr/2017/PN Smg, tertanggal 12 Maret 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

C. JURNAL

- Angkow, Daniel, 2017, "*Kedudukan Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", *Lex et Societatis* Vol. V No. 3, 2017.
- Farah, Alifia Nur, Fauzia Isnangingtyas, dan Zulfatul Uma, 2016, "*Pengabaian Pasal 182 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 ayat (1) KUHP Oleh Hakim Pengadilan Negeri Martapura Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum*", *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Handoko, Ruddy, 2018, "*Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Kermite, Dean Praditya, Jeany Anita Karmite, dan Fanny Tawas, 2021, "*Kajian Terhadap Pembelian Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP*", *Lex Privatum*, Vol. IX, No.4, 2021.
- Mars, Yusuf, Herman dan Handrawan, 2019, "*Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:*

- 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi)", Halu Oleo Legal Research, Vol.1, No.2, 2019.
- Novianto, Widodo Tresno, 2007, "*Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia*", Jurnal Yustisia, No. 70, 2007.
- Priyambodo, Adiyoga dan Kristiyadi, 2016, "*Kesesuaian Pengajuan Kasasi Oleh Pemohon Atas Dasar Putusan Bebas Murni Terhadap KUHP*", Jurnal Verstek, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Stevi Da Costa, 2018, "*Perlindungan HAM Atas Kebebasan Berpendapat Terhadap Tindakan Persekusi*", Lex Et Societatis, Vol. VI, No. 3, 2018.
- Suryanagara, Anggara, Et. Al., 2016, "*Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)*", USU Law Journal , Vol. 4, No. 2, 2016.
- Veronika, Flora, 2016, "*Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru*", JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 1, 2016.
- Waturandang, Nathalia, 2016, "*Kajian Yuridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*", Lex et Societatis Journal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV, No. 2, , 2016.
- Winastri, Rivo Krisna, Ery Agus Priyono, dan Dewi Hendrawati, 2017 "*Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)*", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017.

D. MAKALAH

- Haykal dan Adya Rubiati Alexis, 2020, "Memotret Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD dr. Rasidin Kota Padang", Makalah disampaikan pada Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Essai Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia 2020 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Padang, 13 Desember 2020.

E. MAJALAH

- Budiarta, I Dewa Gede dan I wayan Suardana, 2020, "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni Berdasarkan KUHP", *Majalah Ilmiah Untab* (September 2020), hlm. 125-126.

F. KAMUS

- Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rehabilitasi>.

G. MEDIA ONLINE

ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, “Modul Tindak Pidana Korupsi
ACLC KPK”, <https://aclc.kpk.go.id/wp->



<content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>,

dikunjungi pada tanggal 5 April 2021 Jam 19.12 WIB.

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, “Prosedur Perkara Perdata”, <http://pn-padang.go.id/index.php/layanan-publik/prosedur-berperkara/prosedur-perkara-perdata>, dikunjungi pada tanggal 5 Oktober 2021 jam 14.19 WIB.



